

## TAREKAT HIZIB NAHDLATUL WATHAN DAN PERANNYA DALAM PERPOLITIKAN DI LOMBOK

M. Rohman Ziadi

Alumni UIN Mataram

### Abstract

Tarekat is a Sufi brotherhood in which it contains and practices sufistic principles. In Sufism, there is a very thick concept, namely *zuhud*. *Zuhud* is the emptiness of search, which limits his desire to gain the world. From this it can be seen that the Sufic tradition should be reluctant to desire the world, including politics. However, the Hizib Nahdlatul Wathan as a tarekat appeared to be very active in politics, even the founder and Tarekat murshid Hizib Nahdlatul Wathan became a major driver in politics in Lombok. This is interesting, on the one hand the Hizib Nahdlatul Wathan is a tarekat, but on the other hand it looks very active in the politics of Lombok. Therefore, the authors are interested in studying more about the Hizib Nahdlatul Wathan and its role in politics in Lombok. There are two problem formulations in this article, namely; what is the concept of teaching the Hizib Nahdlatul Wathan Order? What is the religious foundation of the Hizib Nahdlatul Wathan Order in its political activities in Lombok? To answer the two formulations of the problem the author uses a literature review and interview research method. In addition, the author also uses two theories to dissect the formulation of the problem, namely the tarekat theory and the tarekat and political theory of Martin van Bruinessen. The tarekat theory the author uses to answer the first problem statement. While the theory of tarekat and politics of Martin van Bruinessen, the author uses it to answer the problem statement number two.

**Keywords:** Tarekat, Politics, and Islam

### Pendahuluan

Tarekat dapat disebut sebagai sebuah madhab sufistik yang mencerminkan suatu produk pemikiran dan doktrin mistik teknikal untuk menyediakan metode spiritual tertentu bagi mereka yang menghendaki jalan mistik menuju *ma'rifat billah*. Tarekat menjadi sebuah disiplin mistik yang secara normatif doktrinal meliputi sistem wirid, zikir, do'a, etika *tawassul*, ziarah, dan sejenisnya sebagai jalan spiritual sufi. Dengan perkataan lain, tarekat itu mensistematisasikan ajaran tasawuf (sufistik).<sup>1</sup>

Dalam tradisi sufistik, ada sebuah konsep yang sangat kental, yaitu *zuhud*. *Zuhud* itu kekosongan hati dari pencarian, yaitu membatasi keinginannya untuk memperoleh dunia.<sup>2</sup> Dari sini bisa dilihat bahwa semestinya dalam tradisi sufistik itu enggan untuk berhasrat pada dunia,

<sup>1</sup> Agus Riyadi, "Tarekat Sebagai Organisasi Tasawuf", dalam Jurnal *at-Taqaddum*, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014, hlm. 360.

<sup>2</sup> Moh Fudholi, "Konsep *Zuhud* al-Qusyairi dalam Risalah al-Qusyairiyah", dalam Jurnal *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2011, hlm. 42.

termasuk politik. Namun, Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan (Selanjutnya disingkat dengan NW) sebagai tarekat terlihat sangat aktif dalam perpolitikan, bahkan pendiri sekaligus mursyid Tarekat Hizib NW menjadi penggerak utama dalam politik di Lombok. Ini menarik, di satu sisi Tarekat Hizib NW adalah tarekat, tapi di sisi lain ia terlihat sangat aktif dalam perpolitikan di Lombok. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Tarekat Hizib NW dan perannya dalam perpolitikan di Lombok dalam artikel ini.

### **Tarekat Hizib NW**

Tarekat Hizib NW adalah sebuah Tarekat yang didirikan oleh Tuan Guru Kyai Haji (selanjutnya disingkat TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tahun 1967. Ada dua faktor yang melatarbelakangi berdirinya tarekat ini, pertama faktor realitas keberagaman masyarakat Sasak, yaitu karena banyaknya fenomena tarekat yang tidak mengindahkan syariat dan kebanyakan tarekat yang ada aturannya begitu ketat sehingga berat untuk diamalkan di akhir zaman ini. Selain faktor tersebut, hal lain yang juga mendorong lahirnya Tarekat Hizib NW ini adalah pengalaman batin dari sang pendiri, yaitu Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang Tarekat Hizib NW, penulis akan mencoba menjelaskannya secara lebih terperinci dengan mengikuti klasifikasi sebagai berikut:

#### **a. Ajaran Tarekat Hizib NW**

Ajaran Tarekat Hizib NW ini dapat dilihat pada konsep ajaran tarekat (tasawuf) dari sang pendiri, yaitu Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid adalah ajaran tasawuf al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Memang secara langsung beliau tidak pernah mengatakan demikian, tetapi dilihat dari kitab-kitab tasawuf yang diajarkannya setiap hari, beliau lebih sering mengajarkan kitab-kitab al-Ghazali, seperti *Ihya' Ulumuddin*. Secara khusus, beliau banyak memperoleh ilmu tasawuf dari Syaikh Amin al-Kutbi. Sementara untuk tarekat, dalam hal ini Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan, diterimanya dari salah satu guru kesayangan beliau yaitu Al-Allamah Fadlilat Al-Magfurlah Maulana Al-Syaikh Hasan Muhammad Al-Masysyath di Makkah.<sup>3</sup>

Dengan berdasar pada pandangan tasawuf al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi yang diajarkan oleh gurunya tersebut, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid kemudian memiliki

<sup>3</sup> Muslihun Muslim, *Kiprah Nahdlatul Wathan: Dinamika dan Pemikiran NW dari Generasi Pertama hingga Generasi Ketiga* (Jakarta: Benia Publising, 2014), 132.

pandangan tasawuf yang tidak terpisah dengan syariat. Tasawuf yang dikembangkan oleh beliau adalah tasawuf yang selaras dengan syariat. Maka, berkaitan dengan empat tahapan spiritual, syariat, tarekat, hakekat, dan makrifat, beliau mengatakan bahwa syari'at itu merupakan uraian, thariqah merupakan pelaksanaan, haqiqat merupakan keadaan dan ma'rifat merupakan tujuan pokok, yakni pengenalan Tuhan yang sebenar-benarnya. Beliau juga menganalogikan syari'at itu sebagai sebuah sampan (perahu), thariqah itu adalah lautan, haqiqat itu adalah mutiara. Orang tidak akan mendapatkan mutiara kecuali melewati lautan dengan menggunakan sampan (perahu).<sup>4</sup>

Selain menekankan pentingnya syari'at, ajaran Tarekat Hizib NW yang lain adalah fleksibilitas (kemudahan) menjalankan laku-laku tarekat. Sebagaimana telah sebutkan sebelumnya, Tarekat Hizib NW, oleh pendirinya, disebut sebagai tarekat akhir zaman. Keberadaan Tarekat Hizib NW ini merupakan respon terhadap praktik pengalaman tarekat-tarekat yang telah ada selama ini, seperti tarekat Qadariah dan Naqsyabandiyah di Lombok yang terkesan terlalu berat dan memiliki persyaratan yang begitu ketat. Apalagi jika ditambahkan dengan kewajiban *'uzlah* (mengasingkan diri) dari hiruk pikuk kehidupan dunia pada waktu tertentu. Sekalipun *'uzlah* ini juga tidak di larang dalam Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan, sehingga pada umumnya masyarakat merasa enggan untuk mengikutinya. Berdasarkan kondisi ini, maka TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menyusun Thrariqat Hizib NW secara ringkas dan praktis, tanpa mengesampingkan makna esoteriknya (batinnya). Tarekat ini dapat diamalkan oleh setiap orang dalam kondisi apapun, baik pada waktu khusus, maupun pada waktu melaksanakan berbagai macam aktifitas keseharian.<sup>5</sup> Dalam prosesnya memang dianjurkan untuk membaca dalam keadaan suci serta duduk menghadap kiblat, namun itu sifatnya hanya anjuran, tidak wajib, sehingga anggota tarekat boleh mengamalkannya kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, ajaran Tarekat Hizib NW itu selain menekankan pentingnya syari'at ia juga bersifat fleksibel (mudah).

#### **b. Mursyid Tarekat Hizib NW**

Unsur terpenting lain dari Tarekat Hizib NW selain prinsip ajaran di atas adalah mursyid (guru). Secara harfiah mursyid berarti guru rohani pemberi petunjuk atau bimbingan atau orang yang memimpin secara langsung. Dalam tradisi tarekat istilah mursyid dikenal dengan istilah

<sup>4</sup> Muhammad Noor dkk, *Visi Kebangsaan Religius Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainiddin Abdul Majid 1904-1997*, 267.

<sup>5</sup> Sadip Indra dan Siti Nurjanah, "Tasawuf Nusantara: Studi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan", , 230.

*Syaikh* dalam bahasa Arab dan *Pir* dalam bahasa Persia.<sup>6</sup> Sebagaimana tarekat-tarekat pada umumnya, di dalam Tarekat Hizib NW juga ada mursyid yang membai'at dan membimbing para anggota (murid) tarekat. Dalam tradisi Tarekat Hizib NW, mursyid ini disebut juga dengan istilah koordinator.

Mursyid pertama dalam Tarekat Hizib NW adalah pendirinya langsung, yaitu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Beliau merupakan pendiri sekaligus mursyid pertama di lingkungan Tarekat Hizib NW. Wewenang atas Tarekat Hizib NW ini sepenuhnya berada di tangan beliau, mulai dari pembai'atan, bimbingan, ajaran tarekat, bentuk dan bacaan dzikir, dst. Bisa dikatakan bahwa beliau adalah pemilik dari Tarekat Hizib NW ini.

Proses pengangkatan beliau sebagai mursyid Tarekat Hizib NW ini bersifat gaib. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sejak tahun 1964, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid seringkali mendapat bisikan spiritual (gaib) secara langsung maupun tidak langsung (melalui para muridnya) yang menyerukan untuk membentuk suatu perkumpulan tarekat. Ketika TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid bermunajat di Masjid Nabawi tepatnya didekat makam Nabi, hadirilah sebuah suara gaib dari sesosok hamba Allah yang menyuruhnya untuk membuat Tarekat Akhir Zaman, namun beliau masih menganggap itu hanya bisikan syetan. Datang kedua kali suara itu masih beliau dilanda keraguan. Datang ketiga kali, turunlah sesosok wujud yang diyakini sebagai Nabi Khidir yang memegang tangannya di Raudhah seraya berkata: "buatlah Tarekat Akhir Zaman!". Dari peristiwa itulah TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yakin untuk mulai menulis dan menyusun bacaan tarekat serta mencari kitab-kitab ulama terdahulu untuk dijadikan rujukan do'a-do'anya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual yang beliau alami, maka terhitung sejak tahun 1964 secara resmi beliau mulai menyusun amalan dzikir Tarekat Hizib NW dan dapat terselesaikan dengan baik pada tahun 1967.<sup>7</sup> Begitu amalan dzikir Tarekat Hizib NW tersebut selesai, maka seketika itu beliau langsung menjadi mursyid Tarekat Hizib NW dan mulai membai'at orang-orang yang ingin bergabung sebagai anggota tarekat.

Tentang pengangkatan atau pembai'atan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang cenderung bersifat gaib ini, Annemarie Schimmel, pernah berkata bahwa hal semacam itu adalah mungkin di dunia tarekat atau sufistik. Dalam dunia tarekat, pembai'atan dari seorang mursyid yang bukan manusia (gaib), seperti Nabi Khidir As, itu absah. Kadang-kadang para sufi bertemu

<sup>6</sup> Titus Buckhardt, *Mengenal Ajaran Kaum Sufi*, terj. Azyumardi Azra dan Bahtiar Efendi (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984), , 40.

<sup>7</sup> Sadip Indra dan Siti Nurjanah, "Tasawuf Nusantara: Studi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan", 228.

dengannya dalam perjalanan mereka; ia memberi ilham, menjawab pertanyaan mereka, menyelamatkan mereka dari bahaya, dan dalam hal yang khusus, ia menganugerahkan *khirqah* (jubah sufi) kepada mereka, hal yang diterima sebagai sah dalam tradisi mengenai pembai'atan.<sup>8</sup> Dengan demikian, maka pengangkatan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid sekaligus pendiri Tarekat Hizib NW tersebut adalah hal yang sah.

Untuk mursyid yang berikutnya setelah TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid wafat, sistemnya tidak lagi melalui model pengangkatan gaib sebagaimana dialami oleh beliau. Memang, juga ada beberapa kisah mistik yang menyertai pengangkatan penggantinya, tapi sifatnya tidak seperti beliau yang langsung diangkat oleh Nabi Khidir. Setelah beliau wafat, terjadi perpecahan internal dalam tubuh organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, di antara dua putri TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, yaitu Hj. Siti Raihanun dan Hj. Siti Rahun, masing-masing pihak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan mursyid tarekat berbeda. Untuk Pengurus Besar Nahdlatul Wathan versi Hj. Siti Raihanun yang berpusat di Anjani Lombok Timur, nama-nama yang ditunjuk untuk memba'iat dan mengijazahkan Tarekat Hizib NW adalah: (1). Hj. Siti Raihanun (selaku Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan putri TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid), (2). TGH. Mahmud Yasin, (3). TGH. Ruslan Zain, (4). TGH. Abdurrahim (alm). Sedangkan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Wathan versi Hj. Siti Rahun yang sekarang dipimpin oleh putranya TGB H. Zainul Majdi MA, dan berpusat di Pancor Lombok Timur, menunjuk Tuan Guru yang telah mendapatkan amanah pada masa TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid masih hidup; yaitu: (1). TGH. Muhsin Makbul, (2). TGH. Munir, (3). TGH. Muhammad Yusuf Makmun, (4). TGH. Nasrullah.<sup>9</sup>

Terlepas dari adanya perbedaan dalam menentukan mursyid Tarekat Hizib NW antara dua kubu di atas, sebenarnya sebelum wafat TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sudah memberikan semacam isyarat tentang sosok yang akan menggantikan beliau, meskipun tidak secara langsung dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah hak atau wewenang untuk memba'iat atas nama sendiri. Ketika beliau masih hidup, ada beberapa murid beliau yang sering diminta untuk menggantikan beliau dalam memba'iat atau mengijazah anggota-anggota baru Tarekat Hizib NW, yaitu Tuan Guru Haji Muhsin Makbul dan Tuan Guru Haji Nasrullah,<sup>10</sup> dan

<sup>8</sup> Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik dalam Islam*, terj. Supardi Djoko Damono, dkk., 132.

<sup>9</sup> Harapandi Dahri (dkk.), *Reposisi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dalm Tarekat Mu'tabarrah di Indonesia* (Jakarta: Penamadani, 2010), 116-117.

<sup>10</sup> Wawancara dengan TGH. Nasrullah pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 11.42.

dalam keterangan lain disebutkan ada juga Ustadz H.M. Suhaedi (Kalifah/wakil *talkin* untuk Jakarta).<sup>11</sup> Namun, setelah TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang kemudian menjadi mursyid (koordinator) pengganti beliau adalah Tuan Guru Haji Muhsin Makbul.<sup>12</sup>

Pengangkatan Tuan Guru Muhsin Makbul sebagai mursyid ini terbilang cukup menarik. Dalam kisahnya disebutkan bahwa beliau ini bukanlah orang yang cerdas. Beliau hanya seorang tamatan SD dan sehari-hari berprofesi sebagai pedagang alat-alat dapur serta pertanian tradisional. Ia pergi berdagang sesuai dengan hari-hari pasaran di suatu daerah tertentu setiap harinya, seperti hari Minggu di pasar Labuhan Haji, Senin di Pasar Masbagik, Jum'at di Pasar Paok Motang, dst. Tetapi walaupun beliau terbilang tidak memiliki ilmu yang tinggi, laku spiritual beliau terbilang yang paling dibanding murid-murid TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Menurut cerita, beliau ini pernah disuruh ber-*tirakat*, tidak berhubungan suami istri selama delapan tahun oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid dan beliau berhasil melakukannya. Beliau ini termasuk murid yang paling setia dan memiliki kepribadian yang unggul, ikhlas, serta yakin.<sup>13</sup>

Melihat kualitas Tuan Guru Muhsin Makbul yang demikian, maka TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid kemudian mengangkatnya sebagai wakil beliau. Dalam berbagai pengajiannya, TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid sering menyebut dan mempermaklumkan keberadaan dan posisi Tuan Guru Muhsin Makbul di hadapan jamaah dan warga NW sebagai wakilnya dalam pengijazahan dan pemba'atan Tarekat Hizib NW. Bahkan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid juga pernah menobatkannya sebagai pimpinan tarekat dan menunjuknya sebagai koordinator Jama'ah Wirid Khusus NW.<sup>14</sup> Namun, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid tidak mengijinkan anggota Tarekat Hizib NW memanggil TGH Muhsin Makbul dengan sebutan Ustadz (guru), karena di mata beliau, wakilnya itu tidak memiliki cukup ilmu keagamaan untuk bisa dipanggil ustadz. Hanya saja, larangan ini tidak menimbulkan konsekuensi apapun atas kharisma besar yang bersangkutan di kalangan Tarekat Hizib NW, karena hanya beliaulah yang satu-satunya

<sup>11</sup> Ustadz H.M. Suhadi ini sebenarnya tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai mursyid. Beliau hanya diberikan wewenang oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid untuk memba'at orang-orang yang ingin bergabung dengan Tarekat Hizib NW di Jakarta, tetapi mereka yang telah diba'at oleh Ustadz H.M. Suhadi itu, masih harus diba'at lagi oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid ketika sudah berada di Lombok. Abdul Aziz, "Memeluk Tradisi di Alam Modern: Studi Tentang Kelompok Hizib NW di Lombok" dalam Muhammad Noor, dkk. *Visi Kebangsaan Religius Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, 426-427.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ust. Ali Fikri Pancor 26 Juli 2018 pkl. 17.35

<sup>13</sup> Harapandi Dahri (dkk.), *Reposisi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dalm Tarekat Mu'tabarah di Indonesia*, 112.

<sup>14</sup> *Ibid*, , 76.

orang yang secara eksplisit disebut khusus dalam do'a-do'a TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid.<sup>15</sup> Dengan demikian, tentu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tuan Guru Muhsin Makbul ini merupakan mursyid yang ditunjuk langsung atau di-SK langsung oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid sebagai mursyid pengganti beliau, walaupun sebenarnya beliau tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa ijazah atau pembai'atan anggota Tarekat Hizib NW adalah hak Tuan Guru Muhsin Makbul.

### c. Murid Tarekat Hizib NW

Seperti halnya mursyid, murid (pengikut tarekat) juga merupakan unsur penting dalam tarekat. Baik mursyid dan murid, keduanya sama-sama mementuk hierarki tersendiri dalam sebuah tarekat. Mursyid sebagai orang yang membimbing dan memberi petunjuk, sementara murid sebagai orang yang dibimbing dan diberi petunjuk. Hubungan antara mursyid dan murid inilah yang menjadi dasar dalam sistem hubungan dalam sistem sosial tarekat.<sup>16</sup>

Sebagaimana tarekat pada umumnya, dalam Tarekat Hizib NW, unsur murid ini juga ada. Murid yang menerima ijazah dan berbai'at pertama dalam Tarekat Hizib NW adalah Tuan Guru Haji Najmuddin Ma'mun. Sebelum berbai'at, Tuan Guru Haji Najmuddin Ma'mun telah mendapatkan perintah gaib lewat mimpi berjumpa dengan seorang wali yang memerintahkan: "Mintalah ijazah tarekat yang baru disusun gurumu!". Kemudian ia bergegas mendatangi TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid dan menceritakan isi mimpinya itu serta meminta kepada TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid untuk membai'at dan mengijazahkan Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan kepadanya dan beliaupun akhirnya dibai'at sebagai anggota Tarekat Hizib NW.<sup>17</sup> Sejak adanya pembai'atan pertama tersebut, kemudian banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk berbai'at sebagai anggota Tarekat Hizib NW kepada TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid.

Namun, tentang murid pertama ini ada versi yang berbeda. Menurut TGH. Nasrullah, pada sekitar tahun 1965-an, TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid sering menyepi dan beliau mengaku dalam penyepian itu beliau bertemu dengan guru beliau Syekh Hasan Masyar. Padahal waktu itu Syekh Hasan Masyar sudah wafat, murid-murid TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid waktu itu, termasuk TGH. Nasrullah, merasa tidak perlu menanyakan hal tersebut, karena itu diucapkan langsung oleh Maulana Syekh (sebutan untuk TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid).

<sup>15</sup> Abdul Aziz, "Memeluk Tradisi di Alam Modern: Studi Tentang Kelompok Hizib NW di Lombok" dalam Muhammad Noor, dkk. *Visi Kebangsaan Religius Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, 426.

<sup>16</sup> J. Spencer Trimingham, *The Sufi Orders of Islam*, , 107.

<sup>17</sup> Sadip Indra dan Siti Nurjanah, "Tasawuf Nusantara: Studi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan", 230.

Setelah beberapa kali melakukan perjumpaan gaib dengan Syeikh Hasan Masyar, Maulana Syeikh kemudian mengumpulkan beberapa orang murid terdekatnya, termasuk TGH. Nasrullah, dan langsung malam itu mereka semua dibai'at sebagai anggota Tarekat Hizib NW oleh Maulana Syeikh.<sup>18</sup>

Terlepas dari perbedaan versi di atas, keanggotaan Tarekat Nizib NW ini terus berkembang dan semakin banyak dari waktu ke waktu. Berdasarkan data pada tahun 1994 saja, anggota Tarekat Hizib NW tercatat sudah ada sekitar 200-an ribu orang jama'ah (murid).<sup>19</sup> Dan walaupun sejak tahun 2009 lalu, PBNW mengeluarkan Moratorium pembai'atan anggota baru Tarekat Hizib NW, tetapi proses pembai'atan oleh beberapa koordinator masih terus berlanjut. Berdasarkan keterangan salah satu koordinator Tarekat Hizib NW, H. Samsul Islam Kutaraja (putra Tuan Guru Muhsin Makbul), sejak tahun 2013 saja, beliau sudah membai'at sekitar hampir 5000 orang jama'ah baru.<sup>20</sup> Dengan perkataan lain, hingga saat ini Tarekat Hizib NW masih tetap eksis dan terus berkembang, setidaknya dari segi jumlah muridnya.

#### **d. Silsilah Tarekat Hizib NW**

Selain mursyid dan murid, usur lain yang juga penting dalam sebuah tarekat adalah silsilah. Keberadaan silsilah dalam suatu tarekat ini penting sebagai bentuk keabsahan atau sebagai legitimasi kesahihan ajaran-ajarannya (dzikir dan ajaran tasawufnya). Umumnya, setiap *Syaikh* dapat menunjukkan suatu mata rantai para tokoh penting dari tarekat yang diajarkan, yakni silsilah atau genealogi spiritualnya. Biasanya silsilah mengurutkan kembali nama-nama sejak gurunya sampai pada Nabi Muhammad Saw. Semua tarekat mengklaim diriya berasal dari Rasulullah, walaupun terdapat beberapa modifikasi dalam hal cara.<sup>21</sup>

Sebagaimana tarekat pada umumnya Tarekat Hizib NW juga memiliki silsilah yang bersambung hingga ke Rasulullah. Namun, tidak seperti tarekat kebanyakan silsilah Tarekat Hizib NW ini terbilang pendek, sama seperti silsilah tarekat Tijaniyah dan Ahmadiyah (Idrisiyah). Ketiga tarekat ini sama-sama memiliki silsilah yang pendek karena pendiri ketiganya sama-sama mengaku berbait langsung kepada Nabi Khidir atau Nabi Muhammad. Tarekat yang berasal dari Ahmad al-Tijani dan Ahmad Ibn Idris ini silsilahnya pendek, tidak ada yang

<sup>18</sup> Wawancara dengan TGH. Nasrullah pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 11.42.

<sup>19</sup> Harapandi Dahri (dkk.), *Reposisi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dalm Tarekat Mu'tabarah di Indonesia*, 76. Namun, menurut keterangan Tuan Guru Nasrullah, jumlah anggota Tarekat Hizib NW hingga moratorium itu dikeluarkan kurang lebih sekitar puluhan ribu orang. Wawancara dengan TGH. Nasrullah pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 11.42.

<sup>20</sup> Wawancara dengan H. Samsul Islam Kutaraja tanggal 2 agustus 2018 pukul 15:20

<sup>21</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, 263.



menyela antara Nabi Muhammad dengan al-Tijani dan hanya disela nama al-Khidir, al-Dabbagh, dan al-Tazi dalam silsilah Ahmad Ibn Idris.<sup>22</sup> Demikian juga dengan Tarekat Hizib NW, tidak ada nama yang menyela antara TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid dan Nabi Muhammad, kecuali nama Nabi Khidir.

Berikut ini silsilah Tarekat Hizib NW diambil dari pengangkatan langsung atau berdasarkan wasiat TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid:



#### e. Ijazah dan Bai'at Tarekat Hizib NW

Selain ada unsur ajaran tarekat, mursyid, murid, dan silsilah sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam Tarekat Hizib Nw juga ada ijazah dan bai'at. Setiap murid yang hendak menempuh perjalanan spiritual melalui sebuah tarekat, ia harus melaksanakan ritual bai'at terlebih dahulu bersama mursyid tarekatnya. Bai'at ini tidak kurang dan tidak lebih dari sebuah perjanjian antara murid dan gurunya bahwa si murid akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi murid yang baik, taat, serta patuh kepada sang guru, dan terhadap undang-undang yang berlaku sepanjang perjalanan.<sup>23</sup> Dalam tradisi Tarekat Hizib NW ijazah adalah suatu prosesi akad serah terima Tarekat Hizib NW dari mursyid atau koordinator, yaitu TGKH. Zainuddin Abdul Majid atau wakil yang ditunjuknya dalam pengijazahan, kepada calon anggota Tarekat Hizib NW. Sedangkan bai'at adalah perjanjian atau sumpah setia calon anggota Tarekat

<sup>22</sup> *Ibid*, , 200-201.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Sukarnawadi, *Sabda Sufistik: Upaya Memahami Nilai-nilai Keindahan Islam Melalui Pendekatan Tasawuf dan Tarekat*, , 99.

Hizib NW kepada mursyid atau koordinator, yaitu TGKH. Zainuddin Abdul Majid atau wakil yang ditunjuknya.<sup>24</sup>

Dalam tradisi Tarekat Hizib NW saat ini terdapat beberapa versi tentang pembai'atan ini, terutama tentang persyaratan dan prosesi pembai'atannya. Menurut keterangan dalam bukunya Harapandari dkk., *Reposisi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dalam Tarekat Mu'tabarah di Indonesia* dan juga menurut keterangan dari Abdul Aziz dalam artikelnya "Memeluk Tradisi Di Alam Modern: Studi tentang Kelompok<sup>25</sup> Hizib NW Di Lombok", ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk dibai'at sebagai anggota Tarekat Hizib NW, yaitu:

1. Ketaatan kepada pimpinan (mursyid) tarekat, yaitu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, atau yang ditunjuknya
2. Mau mengamalkan Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan setiap selesai shalat lima waktu.
3. Bersedia membantu perjuangan Nahdlatul Wathan
4. Membayar uang shalawat (Rp. 500,-) yang dipergunakan untuk kepentingan madrasah NW.

Selain empat syarat di atas juga disebutkan bahwa, bai'at ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah cukup dewasa.<sup>26</sup> Lebih lanjut Abdul Aziz mengatakan bahwa prosesi pembai'atan dalam Tarekat Hizib NW juga tidak rumit. Begitu seseorang menyatakan kesediaannya untuk memenuhi keempat syarat tersebut, Maulana Syaikh atau yang ditunjuknya langsung membai'atnya di depan umum, sesudah itu, si anggota bebas mengamalkan hizib sesudah solat, apakah sambil berjalan, sambil bercocok tanam, berjualan, atau melakukan pekerjaan keseharian yang lainnya.<sup>27</sup>

Namun, berdasarkan beberapa keterangan yang penulis dapatnya dari hasil wawancara, ada beberapa hal yang berbeda dari persyaratan dan prosesi pembai'atan sebagaimana telah disebutkan oleh Abdul Azis dan Harapan Dahri di atas. *Pertama*, TGH Nasrullah—salah satu

<sup>24</sup> Harapandi Dahri (dkk.), *Reposisi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dalm Tarekat Mu'tabarah di Indonesia*, , 109.

<sup>25</sup> Abul Aziz sengaja tidak menggunakan istilah tarekat untuk menyebut Tarekat Hizib NW dan memilih untuk menggunakan kata kelompok. Hal ini karena menurut Abdul Aziz Tarekat Hizib NW ini bukanlah merupakan sebuah tarekat, ia hanya psudeotarekat saja, tidak lebih.

<sup>26</sup> Harapandi Dahri (dkk.), *Reposisi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dalm Tarekat Mu'tabarah di Indonesia*, , 107 dan Abdul Aziz, "Memeluk Tradisi di Alam Modern: Studi Tentang Kelompok Hizib NW di Lombok" dalam Muhammad Noor, dkk. *Visi Kebangsaan Religius Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, 426.

<sup>27</sup> Abdul Aziz, "Memeluk Tradisi di Alam Modern: Studi Tentang Kelompok Hizib NW di Lombok" dalam Muhammad Noor, dkk. *Visi Kebangsaan Religius Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, 426.

murid langsung TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan salah satu koordinator yang sering ditunjuk sebagai wakil beliau untuk memberi ijazah—mengatakan bahwa untuk dapat dibai'at sebagai anggota Tarekat Hizib NW mula-mula seseorang harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Setelah mendaftar kemudian diberikan amalan-amalan (wirid) untuk dibaca selama kurang lebih 44 hari. Begitu purna mengamalkan selama 44 hari, maka akan langsung dimandikan dengan membaca beberapa wirid khusus dan biasanya dilangsungkan pada hari Jum'at. Proses mandi ini disebut dengan pengijazahan ilmu benteng. Setelah mandi maka seseorang dianggap telah syah menjadi anggota Tarekat Hizib NW dan wajib mengamalkan dzikir-dzikir Tarekat Hizib NW sesuai dengan yang diajarkan pada saat ijazah.<sup>28</sup>

*Kedua*, berdasarkan keterangan H. Samsul Islam (putra TGH. Muksin Makbul), untuk persyaratan mahar itu jumlahnya berbeda dengan yang disebutkan oleh Abdul Aziz. Menurut beliau, mahar untuk masuk dalam keanggotaan Tarekat Hizib NW adalah gula pasir 1/4kg, uang Rp. 5000-10.000. Tapi, mahar itu sifatnya tidak wajib, hanya kalau ada saja, kalau tidak ada, tidak ada kewajiban lain sebagai gantinya. Mahar itu fungsinya hanya sebagai symbol pemanis dan keikhlasan dan pengorbanan jamaah pencinta kepada NW itu sendiri. Kemudian untuk prosesi pembai'atan menurut beliau adalah sebagai berikut: dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, posisi duduk seperti tahiyat akhir, meminta untuk dibai'at, diuji keyakinannya dalam mengikuti pembai'atan, kemudian dibai'at kemudian diijazahkan.<sup>29</sup>

*Ketiga*, menurut TG. Syafridin Pengembur (murid langsung TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, tokoh agama, tokoh masyarakat, kordinator/pembai'at tarekat hizib) syarat pembai'atan sebagai anggota Tarekat Hizib NW itu hanya sedikit, yaitu jika mampu sebelum dibai'at menuntaskan bacaan shalawat sebanyak 4000X (persyaratan sebelum pengijazahan), jika tidak mampu tidak apa-apa. Sementara untuk proses pembai'atannya juga terbilang biasa saja, jika sudah siap, atas kemauan sendiri maka akan dibai'at. Kalau dulu pada masa TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid pembai'atannya dilakukan secara berkelompok (berjamaah), kalau sekarang, menurut beliau, hanya ada pembai'atan secara perorangan tidak dikoordinir seperti dulu. Selanjutnya bisa langsung mengamalkan tarekat tersebut dan tidak ada paksaan dalam pengalamannya.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Wawancara dengan TGH. Nasrullah pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 11.42.

<sup>29</sup> Wawancara dengan H. Samsul Islam tanggal 2 Agustus 2018 pukul 15:20

<sup>30</sup> Wawancara dengan TG. Syafridin Pengembur 27 Juli 2018 pukul 17:05

Demikianlah pembai'atan dan ijazah dalam Tarekat Hizib NW. Dalam beberapa hal memang terdapat perbedaan dan penulis tidak berkepentingan (berhak) untuk memberikan penilaian yang manakah yang lebih benar, tetapi pada prinsipnya adanya proses bai'at dan ijazah di lingkungan Tarekat Hizib NW ini juga menjadi bukti bahwa dalam tarekat ini juga ada proses bai'at dan ijazah sebagaimana tarekat pada umumnya.

#### **f. Dzikir Tarekat Hizib NW**

Hal lain yang juga penting dari sebuah tarekat adalah kegiatan dzikir atau wirid. Menurut Annemarie Schimmel, dzikir itu merupakan makanan spiritual kaum sufi. Ia merupakan langkah pertama di jalan cinta, karena kalau kita mencintai seseorang, kita suka menyebut namanya dan selalu ingat padanya. Pada umumnya dzikir itu terbagi menjadi dua, yaitu dzikir lidah (*dzikir jali, jahri, 'alياهو, lisani*) dan dzikir dalam hati (*dzikir khafi, qalbi*).<sup>31</sup>

Seperti tarekat pada umumnya, dalam Tarekat Hizib NW juga terdapat bacaan-bacaan dzikir khusus. Bacaan dzikir dalam Tarekat Hizib NW disusun oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. Dalam bacaan dzikir tersebut ada empat macam pengamalan dzikir yang wajib dibaca dan diamalkan sesuai waktu pelaksanaannya, jika tidak dibaca maka jama'ah (anggota) tarekat harus meng-*qada'* atau menggantinya pada kesempatan lain.<sup>32</sup> Keempat bacaan zikir itu ialah: (1). *Wadhifah al-Rawatib*, bacaan dzikir yang dibaca dan diamalkan setiap selesai shalat lima waktu; (2). *Wirdu al-Rabithah*, bacaan zikir yang dibaca dan diamalkan menjelang waktu magrib (terbenamnya matahari); (3). *Wadhifah al-Yaumiyyah*, bacaan dzikir yang dibaca dan diamalkan satu kali dalam satu hari; (4). *Wadhifah al-Usubu'iyah*, bacaan dzikir yang dibaca secara berjamaah dan diamalkan satu kali dalam seminggu.<sup>33</sup>

Tiga dzikir yang awal, yaitu *Wadhifah al-Rawatib*, *Wirdu al-Rabithah*, dan *Wadhifah al-Yaumiyyah*, dibaca secara pribadi oleh masing-masing anggota Tarekat. Dengan meminjam bahasanya Annemarie Schimmel di atas maka, tiga bacaan dzikir ini disebut dengan dzikir dalam hati (*dzikir khafi, qalbi*). Sedangkan pembacaan dzikir yang terakhir, yaitu *Wadhifah al-Usubu'iyah*, dilaksanakan secara berjamaah dan dipimpin oleh koordinator atau mursyid Tarekat Hizib NW atau yang telah ditunjuk sebagai wakil untuk memimpin dzikir mingguan.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik dalam Islam*, terj. Supardi Djoko Damono, dkk. , 212-213.

<sup>32</sup> Wawancara dengan TGH. Nasrullah pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 11.42.

<sup>33</sup> *Ibid.* lihat juga Sadip Indra dan Siti Nurjanah, "Tasawuf Nusantara: Studi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan" dalam *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 2. No. 2. Desember 2016, 232.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Setiap pembacaan dzikir tersebut diawali dengan pembacaan *tawassul*, yaitu membaca surat al-Fatihah sebanyak tiga kali yang ditunjukkan khusus kepada:

1. Nabi Muhammad SAW, seluruh para nabi dan rasul, keluarga dan sahabatnya
2. Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, keluarga dan orang-orang yang mencintainya
3. Para ulama dan auliya Allah, kedua orang tua, para guru dan semua warga NW serta kaum Muslimin dan Muslimat.<sup>35</sup>

Setelah membaca *tawassul* kemudian membaca salah satu dari bacaan dzikir di atas.

### **Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan Itu Tarekat dan Bukan Pseudo Tarekat**

Abdul Aziz dalam artikelnya menyatakan bahwa tarekat NW itu bukanlah sebuah tarekat. Ia mengatakan bahwa Tarekat Hizib NW itu termasuk dalam kelompok pseudo-tarekat. Alasan Abdul Aziz menyatakan Tarekat Hizib NW ini bukanlah tarekat melainkan pseudo-tarekat adalah karena amalan atau dzikirnya tidak terlalu berat dan tidak bersifat mengikat. Seperti praktik pseudo-tarekat, dalam Tarekat Hizib itu menyediakan ruang bagi kemerdekaan: merdeka untuk hadir atau tidak hadir dalam kegiatan dzikir kelompok, merdeka untuk mengamalkan amalan secara rutin atau insidental, tanpa harus merasakan kehilangan manfaat spiritual yang diharapkan dari amalan-amalan itu.<sup>36</sup>

Argumen Abdul Aziz di atas tentu perlu ditinjau ulang, karena berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam bab ini dapat dikatakan bahwa Tarekat Hizib NW itu juga termasuk tarekat bukan pseudo-tarekat. Menurut Martin van Bruinessen, sebuah tarekat pertama-tama adalah serangkaian teknik-teknik spiritual dan praktik-praktik ibadah yang khas, seperti dzikir, hizib shalawat, ratib, wirid, dst.<sup>37</sup> Selain itu, Martin van Bruinessen menjelaskan bahwa secara teoritis seseorang hanya dapat menerima pengajaran (*talqin*) tentang amalan-amalan ini dari seorang guru tarekatnya yang berwenang (*mursyid*), dan baru dilakukan setelah menyatakan janji

<sup>35</sup> TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, *Tarekat Hizib NW*, tt. 2-3.

<sup>36</sup> Abdul Aziz, "Memeluk Tradisi di Alam Modern: Studi Tentang Kelompok Hizib NW di Lombok" dalam Muhammad Noor, dkk. *Visi Kebangsaan Religius Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997* (Jakarta: PP Nahdlatul Wathan Jakarta, 2014), 429.

<sup>37</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), , 263.

kesetiaan (berbai'at) kepada syaikh tersebut. Setiap Syaikh juga dapat menunjukkan suatu mata rantai para tokoh penting dari tarekat yang diajarkan, yakni silsilah atau genealogi spiritualnya. Biasanya silsilah mengurutkan kembali nama-nama sejak gurunya sampai kepada Nabi Saw.—semua tarekat mengklaim diri berasal dari Nabi, walaupun terdapat berbagai modifikasi dalam hal cara.<sup>38</sup> Lebih jauh Martin van Bruinessen menjelaskan bahwa banyak tarekat—paling tidak untuk waktu dan tempat tertentu—yang dapat dikatakan “bersifat jamaah”, dalam pengertian bahwa para pengikutnya diharapkan ikut ambil bagian dalam pertemuan dzikir berjamaah (seringkali dilakukan setelah shalat Magrib atau Isya'). Tetapi, dalam banyak kasus yang lain, mengamalkan sebuah tarekat merupakan perkara yang semata-mata bersifat individual, dan para pengikutnya boleh jadi jarang, kalau memang pernah, bertemu satu dengan yang lain.<sup>39</sup>

Berpijak pada pendapat Martin van Bruinessen, maka sejatinya Tarekat Hizib NW telah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai tarekat. Tarekat Hizib NW ini setidaknya memenuhi beberapa kriteria tarekat sebagaimana digambarkan oleh Martin van Bruinessen. Dalam Tarekat Hizib NW ada dzikir, ada mursyid dan murid, ada bai'at dan ijazah, ada kegiatan dzikir secara kelompok dan pribadi, serta ada silsilah. Walaupun silsilah Tarekat Hizib NW ini terbilang pendek, tetapi ini tetap absah untuk disebut sebagai silsilah tarekat. Sebagaimana dikatakan oleh Martin van Bruinessen, terdapat berbagai modifikasi dalam hal silsilah ini. Selain itu, dalam hal silsilah yang pendek ini Tarekat Hizib NW tidak sendirian, karena Tarekat Tijaniah dan Idrisiyah.<sup>40</sup>

Lebih jauh, jika menurut Abdul Aziz Tarekat Hizib NW ini dianggap sebagai psuedo-tarekat karena kelonggarannya, maka ini juga tidak bisa serta merta dianggap benar. *Pertama*, dalam Tarekat Hizib NW sebenarnya tidak sepenuhnya longgar, karena bagi anggota tarekat yang tidak mengamalkan bacaan dzikirnya di waktu yang telah ditentukan, mereka masih berkewajiban untuk meng-*qada'*-nya di waktu yang lain.

*Kedua*, tentang kelonggaran seperti ini Tarekat Hizib NW juga tidak sendirian. Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (selanjutnya disingkat dengan TQN) juga menerapkan kelonggaran atau fleksibilitas dalam menjalankan amalannya. Dalam TQN, untuk menjadi seorang anggota tarekat tidak mensyaratkan calon anggotanya telah mengetahui berbagai ajaran syari'at agama ataupun tergolong orang yang taat. Wirid atau dzikir yang diperintahkan oleh

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, 264.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 200-201.

mursyidnya dapat dikerjakan dalam waktu senggang dan tidak harus di tempat yang rahasia. Ajaran TQN juga tidak mengharuskan adanya prosesi *khalwat* yang dikerjakan dalam bulan-bulan tertentu dan meninggalkan pekerjaan serta keluarga.<sup>41</sup> Dengan demikian, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tarekat Hizib NW itu adalah termasuk tarekat dan bukan psuedo-tarekat sebagaimana dikatakan oleh Abdul Aziz.

### **Peran Tarekat Hizib NW dalam Perpolitikan di Lombok**

Berbicara tentang politik di Lombok, mau tidak mau kita akan berjumpa dengan kiprah TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid—yang tidak lain adalah mursyid sekaligus pendiri Tarekat Hizib NW—dalam politik. Hal ini karena, perpolitikan di Lombok, hampir tidak bisa dilepaskan dari peran beliau sebagai tokoh paling berpengaruh di Lombok, khususnya di Lombok Timur. Dengan perkataan lain, perbincangan politik di Lombok tidak bisa tidak akan bersentuhan dengan kiprah TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid dalam dunia politik. Oleh karena itu, untuk memulai pembicaraan tentang peran Tarekat Hizib NW dalam perpolitikan di Lombok, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca atau melihat kembali peran sang pendiri Tarekat Hizib NW, TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, dalam perpolitikan di Lombok.

TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid selain dikenal sebagai tokoh ulama, pendiri tarekat, dan pendidikan, beliau juga dikenal sebagai salah satu pejuang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Lombok. Di masa perjuangan inilah kontak TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dengan politik, perjuangan memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimulai. Sejarah mencatat bahwa beliau merupakan pelopor serangan terhadap NICA di Selong pada tahun 1946 dan tercatat juga sebagai pejuang fisik maupun di belakang layar pada masa-masa revolusi kemerdekaan (1945-1949). Selain itu, pada tahun 1948 beliau diutus sebagai anggota dari Negara Indonesia Timur yang diutus ke Saudi Arabia untuk menjelaskan kepada Pemerintah Saudi Arabia bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia, bukanlah hadiah dari kolonial Belanda atau Jepang, melainkan kemerdekaan itu merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri.<sup>42</sup>

Pada masa revolusi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid menjadikan Madrasah NWDI dan NBDI sebagai basis perjuangan. Melalui kedua

<sup>41</sup> Ahmad Syaffi'i Mufid, *Tangklukan, Abangan, dan Tarekat: Kebangkitan Agama Jawa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 175.

<sup>42</sup> Muhammad Nur, dkk. *Visi Kebangsaan religius: refleksi pemikiran dan perjuangan TG. H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (1904-1997)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014), 225.

madrasah yang beliau dirikan tersebut, beliau menggelorakan semangat jihad kepada para santri dan guru-guru Madrasah NWDI dan NBDI untuk tetap berjuang menumpas penjajah, khususnya di wilayah Lombok. Akumulasi semangat jihad ini mencapai titik kulminasinya pada pertempuran tanggal 7 Juni 1946 di Kota Selong, Lombok Timur. Pertempuran ini merupakan pertempuran heroik dan patriotik yang pernah dilakukan oleh masyarakat Lombok.

Dalam pertempuran di Selong tersebut yang terlibat tidak hanya dari kalangan santri dan guru-guru Madrasah NWDI dan NBDI, melainkan juga dari kalangan masyarakat Sasak. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid melalui Madrasah NWDI dan NBDI membentuk sebuah gerakan perjuangan bernama Gerakan al-Mujahidin. Sedangkan, kalangan masyarakat Sasak waktu itu memiliki beberapa kelompok gerakan seperti Gerakan Banteng Hitam, Gerakan Bambu Runcing, BKR, API, dll. Semua gerakan tersebut, termasuk Gerakan al-Mujahidin, bersatu pada dalam pertempuran di Selong 7 Juni 1946.

Berdasarkan kisahnya, pada saat itu, tepatnya pada hari Jum'at, malam Sabtu, 7 Juni 1946, pertempuran dimulai dengan gemuruh suara takbir, *Allahu Akbar*. Sembari bertakbir, para laskar gabungan tersebut kemudian menyerbu markas NICA dengan menggunakan senjata keris, golok, klewang, dan bambu runcing. Dalam pertempuran itu TGH. Muhammad Faizal dan Abdullah serta tiga laskar berhasil memasuki markas NICA. Sementara pasukan NICA terkejut dan panik mendapat serangan mendadak tersebut, sehingga mereka memberondong peluru secara membabi buta. TGH. Muhammad Faizal dan dua orang santri NWDI, yaitu Sayyid Muhammad Saleh dan Abdullah gugur dalam pertempuran tersebut. Selain itu, beberapa guru dan santri NWDI juga tertangkap dan dipenjara, seperti TGH Ahmad Rifa'i (adik kandung TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid), Ustadz Haji Muhsin Aminullah, dan beberapa pejuang lainnya.<sup>43</sup>

Usai pertempuran di Selong tersebut, NICA kemudian melakukan ancaman dan intimidasi terhadap madrasah NWDI dan NBDI, terutama kepada TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. Namun, berkat pertolongan Allah<sup>44</sup> serta kepiawaian membela diri, intimidasi dan ancaman tersebut dapat diatasi dengan baik. Alhasil Madrasah NWDI dan NBDI tetap dapat beraktivitas sebagaimana biasa dan dapat melakukan kegiatan dakwah serta pendidikan, bahkan hingga saat ini sudah memiliki banyak cabang di mana-mana.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 226.

<sup>44</sup> Konon pada saat itu, seluruh santri dan guru madrasah NWDI dan NBDI diperintahkan oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid untuk mengamalkan hizib NW. Dipercaya bahwa berkat bacaan berjamaah dan istiqamah tersebut, akhirnya madrasah NWDI dan NBDI berhasil lepas dari ancaman tersebut.



Pada perkembangan berikutnya, ketika kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak lagi berada di masa revolusi kemerdekaan, TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid mulai terjun dalam perpolitikan di Lombok, perpolitikan dalam arti terlibat dalam lembaga pemerintahan dan partai politik. Karir politik beliau pada masa ini dimulai sejak ia diangkat menjadi Konsulat Nahdlatul Ulama (NU) Sunda Kecil pada tahun 1950. Selanjutnya ketika NU bersama-sama ormas Islam lainnya bergabung dalam Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) di Nusa Tenggara Barat, maka beliau diangkat sebagai ketua Badan Penasehat Partai Masyumi untuk daerah Lombok pada tahun 1952.<sup>45</sup>

Kemudian semenjak tahun 1953-1955, TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid menetapkan bahwa beliau dan organisasinya (NW) menganut kebijakan “politik bebas”. Artinya, beliau dan organisasi ini tidak berafiliasi dengan kekuatan partai politik manapun. Sehingga merestui terbentuknya Partai Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan PSII di Lombok pada tahun 1953-1954. Namun, pada tahun 1955, beliau dan organisasinya (NW) memilih untuk berafiliasi dengan partai Masyumi, sehingga beliau diangkat sebagai anggota Konstituante periode 1955-1959, hasil dari pemilihan umum pertama pada tahun 1955.<sup>46</sup>

Setelah partai Masyumi dibubarkan, khususnya di Pulau Lombok, NW, dibaha kepemimpinan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, merupakan ormas Islam yang pertama kali dengan tegas mendukung terbentuknya Parmusi. Asumsinya, Parmusi merupakan duplikasi dari partai Masyumi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid dan masyarakat NW tidak dapat berperan aktif dalam partai tersebut. Ini disebabkan oleh tidak terakomodasinya aspirasi NW sebagai ormas Islam yang memiliki basis konstituen terbesar di Lombok.<sup>47</sup>

Selanjutnya, setelah tidak aktif di Parmusi, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dan masyarakat NW, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, mengubah haluan politiknya dengan berafiliasi kepada Serekat Bersama Golongan Karya (Sekber-Golkar), suatu organisasi yang dibentuk atas gagasan Jendral A.H. Nasution. Dukungan ini didasarkan pada pertimbangan politik, bahwa Golkar adalah partai Orde Baru yang dinilai sukses menumpas G30/S PKI. Keberhasilan ini paling tidak adalah sebuah kemashlahatan bagi kaum muslimin. Dalam

<sup>45</sup> Muhammad Nur, dkk. *Visi Kebangsaan religius: refleksi pemikiran dan perjuangan TG. H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (1904-1997)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), 245.

<sup>46</sup> Fahrurrozi Dahlan, *Tuan Guru Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*, (Jakarta: Sanabil, 2015), 293.

<sup>47</sup> Muhammad Nur, dkk. *Visi Kebangsaan religius...246.*

organisasi politik ini, aspirasi NW—dalam hal ini Tarekat Hizib NW—lebih terakomodir dari pada partai politik lainnya.<sup>48</sup>

Pada pemilihan umum tahun 1982 afiliasi perpolitikan NW—dalam hal ini Tarekat Hizib NW—adalah diam. Waktu itu TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid mengambil sikap politik diam atau diistilahkan dengan Gerakan Tutup Mulut (GTM), artinya masyarakat tidak lagi disuruh untuk memilih Golkar dalam pemilu ini. Berdasarkan keterangan dari TGH Nasrullah, pada saat itu banyak anggota Tarekat Hizib NW mengalami dilema, terutama mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pada waktu ini, karena sikap politik ini, pemerintah Orde Baru mengancam para PNS yang mengikuti sikap politik sang mursyid Tarekat Hizib NW tersebut akan dimutasi ke luar daerah. Pada saat itu jamaah Tarekat Hizib NW, terutama yang PNS, mengalami dilema antara patuh kepada mursyid Tarekat Hizib NW atau mempertimbangkan ancaman Pemerintah Orde Baru. Pada waktu itu, tidak sedikit jamaah Tarekat Hizib NW yang memutuskan untuk berbeda pilihan politik dengan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Dengan perkataan lain, tidak sedikit jamaah Tarekat Hizib NW yang memutuskan untuk melanggar sumpah bai'atnya untuk patuh kepada mursyid demi menghindari ancaman Pemerintah Orde Baru. Namun, tidak sedikit juga anggota jamaah Tarekat Hizib NW yang tetap berpegang teguh pada sumpah bai'atnya dan mengikuti secara penuh sikap politik TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.<sup>49</sup>

Politik diam TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid ini terbilang cukup ampuh dan berpengaruh. Meskipun ada ancaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, akibat politik diam ini pada tahun 1982, Golkar harus mengalami kekalahan telak di Lombok. Atas kejadian tersebut, Golkar berpikir ulang untuk tidak mengakomodir afiliasi politik TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dan membuat kontrak-kontrak politik, yaitu dengan memberikan porsi lebih banyak di parlemen. Maka, pada pemilihan umum periode berikutnya afiliasi politik TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid pun kembali kepada Golkar.

Peta perubahan politik jamaah Tarekat Hizib NW Lombok, secara dramatis berubah setelah meninggalnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid pada tahun 1997. Jamaah Tarekat Hizib NW ada yang tetap konsisten dengan partai Golkar dan ada juga yang berafiliasi dengan partai-partai baru yang dibentuk pasca Orde Baru, yaitu reformasi. Hal ini mengingat bahwa

<sup>48</sup> Fahrurrozi Dahlan, *Tuan Guru Eksistensi....*294

<sup>49</sup> Wawancara dengan TGH. Nasrullah pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 11.42.

kondisi internal NW sepeninggal pendirinya terjadi konflik di antara kedua putri TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, yaitu Hj. Rahun (putri sulung) dan Hj. Raehanun (putri bungsu). Sejak terjadinya perpecahan internal dalam tubuh organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, di antara dua putri TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, yaitu Hj. Siti Raihanun dan Hj. Siti Rahun, masing-masing pihak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan mursyid tarekat berbeda. Untuk Pengurus Besar Nahdlatul Wathan versi Hj. Siti Raihanun yang berpusat di Anjani Lombok Timur, nama-nama yang ditunjuk untuk membaiaat dan mengijazahkan Tarekat Hizib NW adalah: (1). Hj. Siti Raihanun (selaku Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan putri TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid), (2). TGH. Mahmud Yasin, (3). TGH. Ruslan Zain, (4). TGH. Abdurrahim (alm). Sedangkan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Wathan versi Hj. Siti Rahun yang sekarang dipimpin oleh putranya TGB H. Zainul Majdi MA, dan berpusat di Pancor Lombok Timur, menunjuk Tuan Guru yang telah mendapatkan amanah pada masa TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid masih hidup; yaitu: (1). TGH. Muhsin Makbul, (2). TGH. Munir, (3). TGH. Muhammad Yusuf Makmun, (4). TGH. Nasrullah.<sup>50</sup> Api konflik antara kedua putri Pendiri Tarekat Hizib NW ini, pada gilirannya berimbas pada afiliasi politik kedua putri beliau yang secara tidak langsung juga berimbas pada sikap politik jamaah Tarekat Hizib NW.

Pada pemilihan umum pertama di era reformasi, tahun 1999, kedua putri Maulana Assyaikh ini berbeda aspirasi dalam partai politik. Hj. Sitti Rahun berafiliasi kepada PDR, sementara Hj. Sitti Raehanun tetap kepada Golkar. Sedangkan pada pemilu 2004, kedua kubu ini tetap berbeda afiliasi politiknya, Hj. Sitti Rahun berafiliasi kepada PBB, sementara Hj. Sitti Raehanun, yang berkedudukan di Anjani, mendeklarasikan PBR bersama alm. KH. Zainuddin MZ di Jakarta. Pada pemilu tahun 2009 afiliasi politik masing-masing keluarga besar pendiri Tarekat Hizib NW ini tetap berbeda, kubu Hj. Siti Rahun yang semula berafiliasi dengan PBB, kini berafiliasi dengan partai Demokrat, sedangkan kubu Hj. Siti Raehanun masih tetap berafiliasi dengan PBR. Berikutnya, pada pemilihan umum tahun 2014 afiliasi keluarga besar pendiri Tarekat Hizib NW ini masih tetap berbeda. Siti Rahun berafiliasi dengan Partai Demokrat dan mendukung calon presiden Prabowo-Hatta. Sedangkan Sitti Raehanun berafiliasi dengan Partai Hanura dan PKB serta dalam pemilihan presiden mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

<sup>50</sup> Harapandi Dahri (dkk.), *Reposisi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dalm Tarekat Mu'tabarrah di Indonesia* (Jakarta: Penamadani, 2010), 116-117.

Namun, terlepas dari perbedaan-perbedaan afiliasi politik dari kedua putri pendiri Tarekat Hizib NW di atas, sepanjang sejarah perbedaan politik keduanya terjadi, keduanya terbilang sama-sama berhasil meraup suara dominan di Lombok. Artinya, kedua putri pendiri Tarekat Hizib NW ini sama-sama memiliki peran yang signifikan dalam perpolitikan di Lombok. Dan tentu saja, peran mereka ini tidak lepas dari karisma sang ayah, sang mursyid dan pendiri Tarekat Hizib NW, sebagai tokoh besar yang sangat berpengaruh di Lombok.

Lalu, yang menjadi pertanyaan kemudian apakah tindakan atau peran politik para tokoh Tarekat Hizib NW, mulai dari sang pendiri, cucu-cucunya, hingga koordinator penggantinya, ini merupakan peran yang didukung oleh ajaran Tarekat Hizib NW sendiri? Apakah perubahan-perubahan sikap politik para tokoh Tarekat Hizib NW tidak mencerminkan sikap oportunistik? Apakah landasan keagamaan mereka sehingga terlibat aktif dan memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan di Lombok? Pertanyaan ini akan diulas lebih jauh dalam bab berikutnya.

### **Landasan Keagamaan Peran Politik Tarekat Hizib NW**

Cukup menarik melihat realitas keaktifan peran politik beberapa tokoh Tarekat Hizib NW di atas. Tarekat Hizib NW, mulai dari pendirinya, koordinatornya, keturunan pendirinya, koordinatornya, hingga jamaahnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah menunjukkan sikap yang tidak anti-politik bahkan cenderung aktif berperanserta dalam perpolitikan di Lombok. Dan jika diamati, dari berbagai peran politik Tarekat Hizib NW di Lombok itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu cenderung bersikap akomodatif terhadap pemerintah (politik dominan secara nasional) dan bersikap militan (tidak bersahabat dengan pemerintah). Dua sikap ini tergantung pada kondisi yang dihadapi oleh Tarekat Hizib NW. Hal ini sangat tampak ketika pada tahun 1980-an saat pendiri sekaligus mursyid Tarekat Hizib NW melakukan manuver politik diam terhadap Golkar dan tak lama kemudian beralih menjadi pendukung Golkar lagi.

Namun, dalam dua sikap politik tersebut, kecenderungan Tarekat Hizib NW, lebih banyak pada sikap politik akomodatif daripada militan. Hal ini karena, dalam perjalanan sejarahnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tarekat Hizib NW lebih sering menunjukkan sikap akomodatif terhadap pemerintah, daripada sikap militan. Dari segi hitungan waktu, praktis sikap militan Tarekat Hizib NW hanya dilakukan dalam satu periode pemilu saja (tetapi efektif). Sementara selebihnya, lebih banyak menunjukkan sikap yang akomodatif kepada pemerintah. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah sikap yang cenderung akomodatif dari Tarekat Hizib NW ini merupakan sebuah sikap oportunistik atau bukan?

Untuk menjawab itu, hal pertama yang mesti dilakukan adalah dengan melihat secara seksama bagaimana pandangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid tentang Islam dan politik. Dalam pandangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, apabila ada seorang yang telah mengajarkan al-Quran dan al-Hadis, kemudian tidak bisa berpolitik, maka kemampuan mengamalkan ajaran Islamnya itu patut diragukan. Karena dalam al-Quran dan hadis itu penuh dengan persoalan politik baik di tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional, baik pribadi maupun komunal. Menurut beliau, politik Islam itu sarat dengan moralitas, begitu juga lobi-lobi dalam Islam, sangat mudah menemukan titik temu.<sup>51</sup>

Bertolak dari prinsip TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid tersebut, maka untuk menyimak lebih jauh pendapat kita perlu melihat bagaimana penafsiran beliau terhadap beberapa ayat al-Quran dan Hadis. Contoh *pertama*, misalnya ketika beliau menafsirkan Surat al-Naml ayat 34:

*Artinya: Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat*

Ayat ini dianalogikan oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid kepada *setting* sosial bangsa Indonesia ketika masa penjajahan. Masuknya penjajah kolonial ke wilayah Indonesia tidak lain adalah bertujuan untuk menjajah dan menghancurkan mental masyarakat Indonesia serta menjadikan masyarakat pribumi sebagai masyarakat kelas dua yang hina dan harus tunduk kepada kaum penjajah. Sehingga model pemaknaan ayat tersebut oleh beliau menjadi seperti ini: sesungguhnya raja-raja itu (penjajah kolonial) jika mereka dapat memasuki atau menguasai suatu wilayah/daerah, pasti akan bertindak menghancurkan mental penduduk daerah/wilayah itu, dan orang-orang yang dipandang kuat (pemuka-pemuka masyarakat) ditundukkan, bahkan dipojokkan kedudukannya, sehingga mereka berada dalam kondisi hina dan terpojok. Memang seperti itulah taktik-taktik politik para penjajah.<sup>52</sup> Atas dasar tasir inilah kemudian beliau, pada masa penjajahan, turut aktif melakukan perlawanan terhadap para penjajah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Berikutnya penafsiran beliau terhadap al-Quran surat Hud ayat 88:

<sup>51</sup> Muh Samsul Anwar, "Nalar Politik NW", dalam Samsul Anwar dan Hulami Alamin (ed.) *NW Studies: Pendidikan, Sosial, dan Dakwah*, (Himmah NW Press, Ciputat, 2015), hlm. 43.

<sup>52</sup> Afifuddin Adnan, *Diktat Pelajaran Ke-NW-an untuk Madrasah dan Sekolah Menengah NW* (Pancor: Biro Dakwah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi, 1983), hlm. 43.

*Artinya: Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali*

TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid menafsirkan ayat ini sebagai analogi peranan pemimpin politik terhadap masyarakat, yakni mewujudkan kemaslahatan dan tatanan kehidupan yang baik. Pemahaman beliau ini memiliki relevansi dengan makna kaidah *ushuliyah*, yaitu *Tashorrofu al-imam ala al rao'iyati manuthun bi al-mashlahah* (tindakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya senantiasa harus terkait dengan upaya mewujudkan kemaslahatan).<sup>53</sup> Dengan demikian, bagi mursyid sekaligus pendiri Tarekat Hizib NW ini, pemimpin itu memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya.

Berikutnya, masih berkaitan dengan soal kepemimpinan dan kemaslahatan, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sering menyebutkan hadis tentang strategi dalam memberantas kemungkaran:

*Artinya: Barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup, hendaklah dengan lidahnya. Dan apabila ia (masih juga) tidak mampu, hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan inilah kondisi keimanan yang paling lemah.* (HR. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i).<sup>54</sup>

Menurut mursyid sekaligus pendiri Tarekat Hizib NW, kata *bi yadihi* sebagai strategi pertama dalam hadis di atas tidak lain adalah berarti kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemegang otoritas. Bentuknya adalah dengan membuat dan menegakkan produk-produk hukum bagi kemaslahatan rakyat.<sup>55</sup> Dengan kata lain, dalam rangka mengamalkan hadis tersebut, pemerintah harus senantiasa membuat dan menegakkan produk-produk hukum bagi kemaslahatan rakyat.

<sup>53</sup> Muhammad Nur, dkk. *Visi Kebangsaan religius: refleksi pemikiran dan perjuangan TG. H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (1904-1997)*, hlm. 218.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 219.

<sup>55</sup> *Ibid*.

Dalam rangka menafsirkan lebih jauh hadis tersebut, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid mencoba memahami lebih jauh hadis berikut:

*Artinya: Apabila suatu urusan diserahkan kepada mereka yang tidak memiliki kapabilitas, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. (HR. al-Bukhari)*

Menurut beliau hadis ini menegaskan bahwa dalam upaya menciptakan tatanan hukum dan politik yang berorientasi pada kemaslahatan itu niscaya dibutuhkan sumber daya manusia yang kapabel, sehingga mampu untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemegang otoritas. Oleh karena itu, rekrutment politik, sebagai upaya menjaring calon-calon pemimpin hendaknya dilakukan melalui *fit and proper test* dengan mekanisme yang baik dan jujur, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kesalahan dalam proses rekrutmen politik dapat mengakibatkan lahirnya pemimpin-pemimpin lemah yang tidak terpuji.<sup>56</sup> Akibatnya, aktualisasi fungsi kepemimpinannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipastikan akan menghancurkan tatanan sosial politik sebagaimana dikatakan dalam hadis tersebut.

Selain pemimpin yang kapabel, diperlukan juga sarana dan prasarana (infra struktur maupun supra struktur) tatanan kehidupan yang berkeadilan dan maslahat, terutama untuk membendung dan memberantas praktik-praktik kemungkaran. Untuk itu sang pendiri Tarekat Hizib NW ini kemudian mengutip surat al-Anfal ayat 60 sebagai rujukannya:<sup>57</sup>

*Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).*

Demikianlah beberapa ayat, hadis, dan pendapat para ulama yang sering dikutip oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dalam menjelaskan tentang Islam dan politik.

Namun, selain menggunakan al-Quran, as-Sunnah, dan pendapat para ulama tersebut, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid juga selalu merujuk kepada nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti semangat egalitarianisem, musyawarah, keadilan dan amanah. Nilai-nilai ini merupakan konsep generik dari al-Quran sebagai acuan dan dipraktikkan secara baik dan

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 220.

konsisten oleh Nabi Muhammad. Berdasarkan kerangka dasar inilah Nabi Muhammad mengembangkan kepemimpinan moral dalam kehidupan politiknya. Kepemimpinan moral yang mewarnai seluruh kehidupan politik beliau tampaknya merupakan respon yang tepat dalam menghadapi struktur masyarakat pra Islam yang feodalistik dan represif. Karena yang ditekankan adalah aspek moralitas, maka politik Islam pada zaman Nabi berfungsi sebagai sarana moral yang cukup efektif.<sup>58</sup>

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, juga al-Quran, Hadis, serta pendapat ulama, beliau kemudian berpendapat bahwa ber-Islam itu juga harus berpolitik. Hal ini tersirat dalam salah satu bait syi'ir TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid berikut:

*Agama bukan sekedar ibadah*

*Puasa sembahyang di atas sajadah*

*Tapi agama mencakup aqidah*

*Mencakup syari'ah mencakup hukuman.*<sup>59</sup>

Dari bait syair TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa pilihan beliau untuk terlibat aktif dalam dunia politik bukanlah hal yang tidak berdasar. Pilihan beliau untuk turut berperan dalam perpolitikan di Lombok, tidak lain adalah konsekuensi logis dari pendapat beliau tentang Islam dan Politik di atas.

Selain itu, melihat pendapat TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid tentang Islam dan politik di atas, dapat dimafhumi kemudian, mengapa nama tarekat yang beliau dirikan ini menjadi Tarekat Hizib NW. Dari nama ini (Nahdlatul Wathan) dapat disimpulkan bahwa ada visi strategis yang hendak dibangun, yaitu adanya relasi antara agama dan negara secara simbiosis mutualisme. Negara sebagai sebuah institusi memerlukan agama sebagai basis moral untuk menegakkan berdirinya suatu institusi negara. Sementara agama tidak akan berfungsi maksimal tanpa ada dukungan dari negara.<sup>60</sup> Menurut beliau penyematan nama Nahdlatul Wathan dalam Tarekat Hizib ini mengandung dua makna filosofis, yaitu kebangsaan dan keagamaan. Antara agama dan negara diposisikan sama dalam satu tarikan nafas, yakni membangun agama berarti membangun negara, begitu juga sebaliknya. Namun, untuk mencapai makna filosofis ini, paling tidak terdapat lima kesadaran yang direfleksikan dari kata Nahdlatul Wathan, yaitu 1. *Wa'yu al-*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*, Bait 78.

<sup>60</sup> Muslihun Muslim, *Kiprah Nahdlatul Wathan: Dinamika Pemikiran dan Perjuangan Dari Generasi Pertama Hingga Generasi Ketiga* (Jakarta Timur: Bania Publishing, 2012), hlm. 35.



*din*, yaitu kesadaran beragama; 2. *Wa'yu al-ilmi*, yaitu kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan; 3. *Wa'yu an-nizham*, yaitu kesadaran berorganisasi; 4. *Wa'yu al-ijtima'*, yaitu kesadaran sosial kemasyarakatan, dan; 5. *Wa'yu al-wathan*, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara.<sup>61</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterlibatan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid Tarekat Hizib NW dalam perpolitikan di Lombok ini bukanlah hal yang tidak berdasar, karena nyatanya hal tersebut senafas dengan nama dan visi Tarekat Hizib NW.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat dibilang cukup untuk menjelaskan landasan keagamaan mengapa Tarekat Hizib NW, khususnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid dan pendiri Tarekat Hizib NW, memilih untuk terjun dan terlibat aktif dalam perpolitikan di Lombok. Namun, apakah alasan-alasan tersebut cukup untuk menjadi landasan dari sikap politik Tarekat Hizib NW, khususnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid dan pendiri Tarekat Hizib NW, yang cenderung akomodatif daripada militan terhadap pemerintah yang berkuasa?

Dalam perjalanan peran politiknya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid terlihat mengalami derivasi pemaknaan terhadap politik aliran. Jika dilacak aktivitas politik beliau pada masa awal, tampak sangat ideologis, yaitu aliran politik yang dipilih beliau adalah Islam (Masyumi). Pilihan ideologis ini terjadi karena memang pada saat itu pertarungan ideologis demikian mengeras dan mengkristal antara aliran Islam dan Nasionalisme secara *vis a vis*.<sup>62</sup>

Pasca konstituante atau tepatnya pada masa Orde Baru, politik aliran mengalami pasang surut akibat kebijakan politik Orde Baru yang sangat represif. Dalam kondisi ini, para penganut Islam politik mengalami tantangan yang cukup besar dari kekuasaan untuk mengartikulasikan aktivitas politiknya. Sehingga sebagian mereka melakukan reorientasi perjuangan politik dengan memilih dua pendekatan perjuangan. *Pertama*, berjuang dari dalam kekuasaan dengan melakukan kompromi dan negosiasi pada kekuatan Orde Baru. *Kedua*, berjuang dari luar kekuasaan melalui gerakan-gerakan kultural dan gerakan politik bawah tanah.<sup>63</sup>

Dalam konteks ini, Tarekat Hizib NW, khususnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid dan pendiri Tarekat Hizib NW, juga melakukan reorientasi perjuangan politiknya dengan memilih pendekatan pertama. Meskipun dalam satu periode pemilu, yaitu

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>62</sup> Muhammad Nur, dkk. *Visi Kebangsaan religius: refleksi pemikiran dan perjuangan TG. H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (1904-1997)*, hlm. 347.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 348.

tahun 1982, beliau sempat bersikap militan terhadap Orde Baru, tetapi itu hanya berlangsung sesaat dan cenderung lebih dominan sikap akomodatifnya terhadap pemerintah Orde Baru dengan bergabung bersama Golkar. Beliau memilih Golkar sebagai afiliasi politiknya dengan alasan bahwa Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang pada batas-batas tertentu diyakini dapat memberikan patronase kepada perjuangan beliau. Di samping itu, pilihan untuk merapat pada Golkar itu dilakukan dengan asumsi bahwa hal tersebut dapat membawa masalah bagi masyarakat Islam saat itu daripada melakukan konfrontasi terhadap Orde Baru.<sup>64</sup> Hal ini setidaknya terlihat ketika pada tahun 1980-an beliau sempat memilih untuk bersikap konfrontatif terhadap pemerintah (Golkar) dan hasilnya selain sikap itu membuat Golkar berpikir ulang dan kalah, hal itu juga membuat banyak jamaah Tarekat Hizib NW mengalami dilema, terutama yang menjadi PNS.

Jika ditelusuri lebih jauh, alasan atau dasar pemikiran pilihan sikap politik TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid dan pendiri Tarekat Hizib NW tersebut sebenarnya tidak menyimpang dari sikap politik ulama Sunni pada umumnya. Kecenderungan sikap politik akomodatif beliau dengan mempertimbangkan kemaslahatan tersebut, sejatinya konsisten dengan pemikiran politik atau ideologi politik Sunni, sebagai aliran teologi Islam yang dianut oleh beliau. Pemikiran politik ulama Sunni ini sudah mengalami perkembangan selama sekitar 500 tahun, diawali pada abad ke-9 oleh ulama fiqh, seperti al-Baqilani (950-1113), al-Baghdadi (wafat 1037), al-Mawardi (974-1058), al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Jama'ah (wafat 1333), dan Ibnu Khaldun (wafat 1406).<sup>65</sup>

Masalah yang terus menerus menyita perhatian para ahli fikih itu adalah runtuhnya kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Menurut teori politik Islam pada awalnya, khalifah adalah pengganti utusan Allah dan, dengan demikian, juga merupakan pemimpin spiritual dan pemimpin sementara tertinggi bagi umat Islam. Sudah merupakan tanggungjawab Khalifah untuk menegakkan syariat dan membela umat. Karena hukum Allah dianggap mencakup semua urusan, tidak ada pemisahan antara kekuasaan keagamaan dan kekuasaan sekuler seorang khalifah. Namun, mulai pertengahan abad ke-9 kekuasaan politik khalifah mulai terpecah-pecah karena para panglima perang dan kaum bangsawan yang berkuasa di daerah masing-masing

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar (Yogyakarta: LkiS, 1998), hlm. 62.

berhasil merebut kekuasaan militer.<sup>66</sup> Sejak tahun 945 Dinasti Abbasiyah terpaksa menyerahkan kekuasaan atau ibu kotanya, Baghdad, kepada para penguasa Buwaihiyah. Kurang dari sepuluh tahun kemudian, kekuasaannya digantikan oleh dinasti Saljuk. Terakhir sekitar tahun 1258, Bangsa Mongol berhasil menaklukkan Bagdad dan praktis hanya tersisa Dinasti Mamluk di Kairo Mesir.

Peristiwa-peristiwa tersebut pada gilirannya menimbulkan dilema bagi para ahli hukum, apakah mereka akan tetap menegakkan kekuasaan mutlak khalifah, yang berarti menentang tuntutan-tuntutan para panglima perang, atau menyesuaikan diri dengan penguasa baru. Pilihan pertama berisiko timbulnya kekacauan sosial dan akan menempatkan umat Islam pada posisi rawan terhadap kekejaman aksi balas dendam dari kekuasaan militer yang menang. Sementara pilihan yang kedua menuntut adanya kompromi atas gagasan politik keagamaan Islam yang asli.<sup>67</sup>

Sebagian besar ahli hukum dari kalangan Sunni memilih untuk bekerjasama dengan penguasa baru. Mereka beralasan bahwa tanggungjawab mereka yang utama adalah menyelamatkan Islam dan para pemeluknya. Untuk itu, mereka harus berusaha agar ketenteraman dan kestabilan masyarakat dapat terjaga, karena hal itu dipandang sebagai syarat terciptanya ketaatan dan kerukunan umat. Hanya di dalam masyarakat yang tertib, perintah Allah dapat ditegakkan dan umat Islam dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik. Hal itu diperlukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, ketenteraman dan ketaatan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Mengutip perkataan al-Ghazali, “ketertiban beragama hanya mungkin dicapai melalui terwujudnya ketertiban dunia.”<sup>68</sup>

Berpegang pada prinsip tersebut kemudian para ahli hukum kalangan Sunni secara bertahap mulai merumuskan kembali teori politik Islam untuk merefleksikan kenyataan dalam sejarah tetapi sekaligus juga melestarikan semangat dan unsur-unsur penting yang terkandung dalam hukum Allah. Para penguasa duniawi yang diakui dan sah seperti para amir dan sultan diharapkan mengikuti wewenang keagamaan Khalifah Abbasiyah. Prasyarat-prasyarat dan pedoman-pedoman yang melekat pada penguasa-penguasa duniawi berangsur-angsur melunak sampai pada abad ke-14, ketika semua wewenang, bagaimanapun cara memperolehnya, dianggap sah secara hukum sepanjang masih menghormati hukum Islam. Teori tersebut

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>68</sup> *Ibid.*

merupakan teori politik Islam yang paling besar kecenderungannya dan yang paling absurd aturan-aturannya. Penguasa dzalim yang merebut kekuasaan dengan kekuasaan militer, sama berhakannya untuk mendapatkan pengesahan dan kesetiaan dengan penguasa yang baik yang dipilih secara bebas oleh masyarakat. Ungkapan terkenal yang sering dikaitkan dengan para ahli hukum Maliki adalah “yang berkuasa harus ditaati”. Ibu Jama’ah lebih jauh mensitir pernyataan Ibnu Umar, “kami berpihak kepada yang menang”. Dengan berjalannya waktu, gagasan yang sesungguhnya mengenai wewenang khalifah hanya tinggal cerita.<sup>69</sup>

Menurut Greg Fealy, proses adaptasi dan perumusan kembali teori tersebut mengungkapkan beberapa karakteristik penting dalam pemikiran politik Sunni. Yang pertama adalah keluwesan yang melekat dalam teori politik Sunni. Aspek-aspek yang bersifat menentukan sengaja dibiarkan kabur agar lebih mudah disesuaikan dengan kondisi sosial-politik yang baru. Para ahli hukum menyatakan bahwa, bila keadaan memaksa, diizinkan untuk mengesampingkan peraturan-peraturan yang tidak mungkin diterapkan. Dengan demikian, teori politik Sunni memang bukan suatu cetak biru untuk masa depan, melainkan lebih merupakan pembenaran *post eventum* atas preseden dalam sejarah. Hal itu merupakan unsur inti yang disebut sebagai kejeniusan beradaptasi masyarakat Sunni. Realisme yang sangat kuat mendasari kelunakan teori itu. Para ahli hukum generasi selanjutnya diyakinkan atas ketidaberdayaan mereka menghadapi kekuatan-kekuatan politik yang unggul dan berpeluang untuk memusuhi. Mereka memandang bahwa kegigihan untuk bertahan bukan sekedar sesat, bila nasib umat dipertaruhkan, melainkan juga sia-sia.<sup>70</sup>

Berpijak pada kenyataan itu dapat dikatakan bahwa sejatinya, sikap politik TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid dan pendiri Tarekat Hizib NW yang cenderung akomodatif terhadap penguasa sebenarnya selalu konsisten berpegang pada pemikiran politik Islam kalangan Sunni yang sudah sejak awal beliau anut. Sikap politik beliau ini didasarkan pada fiqh Sunni abad pertengahan yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya (maslahat). Sikap ini diambil agar dapat menjauhi segala bentuk aksi yang dapat mengancam kesejahteraan fisik dan spiritual masyarakat. Ada sejumlah dalil fiqh yang membentengi prioritas tersebut, diantaranya adalah *maslahat* (mengejar kemanfaatan) dan *mafsadah* (menghindari kerusakan), *amar ma'ruf nahi mungkar*

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 65-66.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 66.

(menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta *akhaffud dararain* (memilih yang paling kecil risikonya dari dua pilihan yang sama-sama buruk).<sup>71</sup> Dengan perpijak pada prinsip ini, maka tidak heran jika kemudian sikap politik TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid dan pendiri Tarekat Hizib NW lebih cenderung akomodatif terhadap penguasa daripada militan terhadap penguasa. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa sikap politik beliau itu adalah sikap politik yang berprinsip, bukan oportunistis.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan tuliskan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarekat Hizib NW ini setidaknya memenuhi beberapa kriteria tarekat sebagaimana digambarkan oleh Martin van Bruinessen, yaitu bahwa dalam tarekat itu ada beberapa unsur diantaranya *mursyid*, *murid*, *silsilah*, *dzikir (hizib)*, dan proses *bai'at*. Dalam Tarekat Hizib NW ada dzikir, ada mursyid dan murid, ada bai'at dan ijazah, ada kegiatan dzikir secara kelompok dan pribadi, serta ada silsilah. Selain itu, jika menurut Abdul Aziz Tarekat Hizib NW ini dianggap sebagai psuedo-tarekat karena kelonggarannya, maka ini juga tidak bisa serta merta dianggap benar karena dalam Tarekat Hizib NW sebenarnya tidak sepenuhnya longgar. Anggota tarekat yang tidak mengamalkan bacaan dzikirnya di waktu yang telah ditentukan, mereka masih berkewajiban untuk meng-*qada'*-nya di waktu yang lain. Lebih jauh dari itu, tentang kelonggaran seperti ini Tarekat Hizib NW juga tidak sendirian. Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (TQN) juga menerapkan kelonggaran atau fleksibilitas dalam menjalankan amalannya. Dengan demikian, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tarekat Hizib NW itu adalah termasuk tarekat dan bukan psuedo-tarekat sebagaimana dikatakan oleh Abdul Aziz.
2. Dalam perpolitikan di Lombok, Tarekat Hizib NW, khususnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid dan pendiri Tarekat Hizib NW, tampak memiliki andil dan pengaruh yang besar. Sejak beliau masih hidup bahkan setelah beliau meninggal, nama beliau memberikan pengaruh tersendiri pada perpolitikan di Lombok. Dalam

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 362-363.

perjalanan peran politiknya, Tarekat Hizib NW, khususnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai mursyid dan pendiri Tarekat Hizib NW, yang cenderung akomodatif daripada militan terhadap pemerintah yang berkuasa. Sikap politik Tarekat Hizib NW, khususnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, ini sebenarnya selalu konsisten berpegang pada pemikiran politik Islam kalangan Sunni yang sudah sejak awal beliau anut. Sikap politik beliau ini didasarkan pada fiqh Sunni abad pertengahan yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya (maslahat). Sikap ini diambil agar dapat menjauhi segala bentuk aksi yang dapat mengancam kesejahteraan fisik dan spiritual masyarakat. Ada sejumlah dalil fiqh yang membentengi prioritas tersebut, diantaranya adalah *maslahat* (mengejar kemanfaatan) dan *mafsadah* (menghindari kerusakan), *amar ma'ruf nahi mungkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta *akhaffud dararain* (memilih yang paling kecil risikonya dari dua pilihan yang sama-sama buruk). Dengan demikian, menjadi jelas bahwa sikap politik beliau itu adalah sikap politik yang berprinsip, bukan oportunis.

### Daftar pustaka

- Aceh, Abu Bakar. *Pengantar Ilmu Tarekat*. (Semarang: Ramdhani. 1993)
- Ambari. Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997)
- Anwar, Samsul dan Hulami Alamin (ed.) *NW Studies: Pendidikan, Sosial, dan Dakwah*, (Himmah NW Press, Ciputat, 2015)
- Adnan, Afifuddin. *Diktat Pelajaran Ke-NW-an untuk Madrasah dan Sekolah Menengah NW* (Pancor: Biro Dakwah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi, 1983).
- Baharuddin. *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Press. 2007)
- Bertens. K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* (Jakarta: Gramedia. 2006)
- Bruinessen. Martin Van. *Kitab Kuning. Pesantren dan Tarekat*.(Yogyakarta: Gading Publishing) 2015.
- ."Tarekat dan Politik: Amalan untuk Dunia atau Akhirat?" dalam majalah *Pesantren* vol. IX no. 1 (1992
- ". *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung; Mizan. 1992)

- Buckhardt, Titus. *Mengenal Ajaran Kaum Sufi*. terj. Azyumardi Azra dan Bahtiar Efendi (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 1984)
- Budiwanti. Erni. *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS. 2000)
- ". *The Impact of Islam on the Religion of the Sasak in Bayan. West Lombok*" dalam *Kultur* Volume I. No.2. 2001.
- Dahlan, Fahrurrozi. *Tuan Guru Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*, (Jakarta: Sanabil. 2015)
- Dahri. Harapandi (dkk.). *Reposisi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan dalam Tarekat Mu'tabarrah di Indonesia* (Jakarta: Penamadani. 2010)
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*. (Jakarta: LP3ES. 1990)
- ". "Santri Abangan dalam Kehidupan Orang Jawa: Teropong dari Pesantren" dalam Prisma. V. Juni 1978.
- Ecklund. Judith. *Marriage. Seaworms and Song: Ritualized Responses to Cultural Change In Saasak Life* (USA: Cornell University. 1977)
- Fudholi. Moh. "Konsep Zuhud al-Qusyairi dalam Risalah al-Qusyairiyah". dalam *Jurnal Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 1. No. 1. Juni 2011.
- Firdaus. M. dan Ahmad Muzayyin (ed.). *Visi Kebangsaan Religius: Kiprah dan Perjuangan. Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai Pendidik. Pejuang. Pendiri Tarekat. Pendiri Organisasi Masyarakat Terbesar Lombok. dan Politisi Muslim* (Jakarta: Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta. 2014)
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar (Yogyakarta: LkiS. 1998)
- Fitriani. Mohamad Iwan. "Kepemimpinan Kharismatis-transformatif Tuan Guru dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan" dalam *Al-Tahrir*. Vol. 16. No. 1 Mei 2016 : 175 - 195
- Hamdi. Saipul. *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama. Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2014)
- Hardiman. F. Budi. *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Kanisius. 2015)

- Hasyim. Syafiq. *Mutiara dari Timur: Biografi Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid* (Jakarta: Gramedia. 2003).
- Howel. Julia Day “Sufism and the Indonesian Islamic Revival”. Dalam *The Journal of Asian Studies* 60. no. 3. August 2001.
- Indra. Sadip dan Siti Nurjanah. “*Tasawuf Nusantara: Studi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan*” dalam *Jurnal Yaqzhan*. Vol. 2. No. 2. Desember 2016.
- Jamaluddin. “*Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan di Lombok (Abad XVI-XIX)*” dalam *Indo-Islamica*. Vol. 1. No. 1. 2012.
- Majid. Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul. *Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru*. Tt.  
-----, *Hizib Nahdlatul al-Wathan. Hizib Nahdlatul al-Banat* (Jakarta: Nahdlatul Wathan Jakarta. 2002)  
-----, *Tarekat Hizib NW*. tt.
- Masnun. *Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam di Nusa Tenggara Barat* (Tanpa Kota Terbit: Pustaka al-Miqdad. 2007)
- Macdougall. John M. “*Criminality and the Political economy of security in Lombok.*” dalam buku Henk Schulte Nordholt. Gerry van Klinken (ed.). *Local Politics in Post-Suharto Indonesia* (Brill. 2007).
- Mu'min. Ma'mun. “*Pergumulan Tarekat dan Politik (Peran Kyai Haji Muhammad Siddiq dalam Tarekat dan Politik Kudus)*”, dalam *Jurnal Fikrah*. Vol. 2. No. 1. Juni 2014.
- Mukhtaruddin. *Organisasi Nahdlatul Wathan di Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat* (Semarang: Balai Penerbit Aliran Kerohanian. 1997)
- Muslim. Muslihun. *Kiprah Nahdlatul Wathan: Dinamika dan Pemikiran NW dari Generasi Pertama hingga Generasi Ketiga* (Jakarta: Benia Publising. 2014). 132.
- Mufid Ahmad Syafi'i. *Tangklukan. Abangan. dan Tarekat: Kebangkitan Agama Jawa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006. 175.
- Munawwir. Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1984)
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. (Jakarta: UI Press. 1985)



- Nur. Muhammad dkk. *Visi Kebangsaan religius: refleksi pemikiran dan perjuangan TG. H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (1904-1997)*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2004)
- Rahman, Fazlur. *Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1992)
- Riyadi. Agus. "Tarekat Sebagai Organisasi Tasawuf". dalam Jurnal *at-Taqaddum*. Volume 6. Nomor 2. Nopember 2014
- Rusli, Ris'an. *Tasawuf dan Tarekat: Studi Pemikiran dan Pengalaman Sufi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013)
- Schimmel. Annemarie. *Dimensi Mistik Islam*. diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono (et. al.) dari *Mystical Dimension Of Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus) 2000.
- Shodiq, Ja'far. *Pertemuan antara Tarekat dan NU: Studi Hubungan Tarekat dan NU dalam Konteks Komunikasi Politik 1955-2004*. (Yogyakarta: LkiS. 2008)
- Sudirman. *Orientasi Sufistik Cak Nur: Komitmen Moral Seorang Guru Bangsa* (Jakarta: Paramadina. 2001)
- Sukarnawadi. Abdul Aziz. *Sabda Sufistik: Upaya Memahami Nilai-nilai Keindahan Islam Melalui Pendekatan Tasawuf dan Tarekat* (Yogyakarta: Mahameru Press. 2009)
- Tahir. Masnun. "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok" dalam Jurnal *Asy-Syir'ah*. Vol. 42. No. I. 2008.
- Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat. *Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat* Jil. 1. (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1977)
- Trimingham, J. Spencer. *The Sufi Orders of Islam* (New York: Oxford University Press. 1973)
- Wacana. Lalu. *Sejarah Nusa Tenggara Barat* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah Mataram: Mataram. 1978)
- Wawancara dengan Tuan Guru Syafrudin Pengembur (murid langsung TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. tokoh agama. tokoh masyarakat. kordinator/ pembai'at tarekat hizib). Pengembur. 27 Juli 2018 pukul 17:05
- Wawancara dengan TGH. Nasrullah pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 11.42.
- Wawancara dengan Ust. Ali Fikri Pancor 26 Juli 2018 pkl. 17.35
- Wawancara dengan H. Samsul Islam Kutaraja tanggal 2 agustus 2018 pukul 15:20